

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Erliyana, Anna. 2016. *Buku1 Problematika Pemilukada Serentak. 2015. Potret Pemilukada Serentak*. Jakarta pusat: DKPP RI.
- Firmanzah. 2010. *Legitimasi, Kekuasaan dan Marketing Politik Persaingan, Pembelajaran Politik Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Heru Irianto, Burhan Bungin & Dalan Burhan Bungin. 2001, *Metode Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto. 2007. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* Jakarta: kencana.
- Lexy J. Moleong. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Manasse Malo. 1985. *Metode Penelitian Sosial Modul 1-5*. Jakarta: Kuranika
- Jimly Asshiddiqie, dkk. 2015. *Outlook 2016. Refleksi dan Proyeks*. Jakarta: DKPP RI
- Harun Rafley. 2015. *Pemilu Konstitusional Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta.
- Pranomo Sidik. 2011. *Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta.
- Rusta Andri. 2015. *Buku1 problematika Pemilukada Serentak 2015Antara Hukum Dan Etika di Tengah Pesta Masyarakat Lapar, Antara Program Versus Uang Tahun 2015*. Jakarta pusat: DKPP RI
- Surbakti Ramlan & Kris Nugroho. 2015. *Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Studi tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta.
- Supriato Didik, *Menjaga Independensi Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2012
- Sugiyono.2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sanapiah Faisal. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang.

Jurnal dan internet

Alan Wall. 2010, *Electoral Management Design: The International IDEA Handbook*, International IDEA, Stockholm, hlm. 22-25, dalam Yulianto, Veri Junaidi, *Memperkuat Kemandirian Penyelenggara Pemilu (Rekomendasi Revisi Undang-Undang Penyelenggara Pemilu), Position Paper Hasil Diskusi dan Analisa Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*. Jakarta.

Arum rahma sari. *Pengawasan Represif Panitia Pengawas Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015*. Fakultas ilmu Sosial Ilmu Politik. Universitas Lampung. 2016

Herdiana meira. *Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Bersama-Sama (suatu tinjauan yuridis putusan nomor 01/pid.s/2010/pn.gs)*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto.2013

Pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh. Diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/07/14561721/Pilkadaserentak2015>. Edisi September 2016

Rensius Rimondo. *Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) Dalam Mewujudkan Tahapan Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Yang Jujur Dan Adil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (studi Panwaslu Kota Semarang)*. Fakultas Hukum Universitas Semarang. 2015

Undang-undang dan peraturan

DKPP RI. *Peraturan Bersama Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2012*. Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu

International IDEA, 2002. *Standar-standar Internasional Pemilihan Umum, Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, Seri Buku Panduan*, International IDEA, Jakarta

Laporan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Payakumbuh. Tentang Kajian Temuan nomor :02TM/PILWAKO/X/2016.

Putusan DKPP no 133/DKPP-PKE-V/2016. Salinan Putusan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu. Diunduh dari laman: www.dkpp.go.id.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2012.
Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum
Undang Undang Republik Indonesia. Pasal 22E ayat (5). Tentang
Penyelenggara Pemilu

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana terakhir telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan
Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota

Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-55/ PJ/2015 tentang Tata Cara
Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Wajiban
Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh No. 23/ BA/ IX/ 2016
tentang Klarifikasi Domuen yang Dikeluarkan Oleh Kantor Pelayanan Pajak
sebagai syarat menjadi Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tertanggal 29 September 2016;

